

Jiwa Kesantrian dan Spirit Kemanusiaan

Fathorrahman Ghuftron

KEMENTERIAN Agama baru-baru ini mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomor 13 tahun 2022 tentang Hari Santri 2022. SE ini menjadi salah satu konsideran penting bagi masyarakat agar memerhatikan pelaksanaan Hari Santri Nasional (HSN). Setidaknya, dengan merefleksikan HSN, kita bisa selalu menengang dan mengingat peran para ulama masa lalu, terutama dari kalangan santri dan pesantren.

Adanya seruan memperingati HSN yang disampaikan pemerintah melalui keputusan presiden (Keppres) No 22 tahun 20215 menjadi sinyalemen historis. Bahwa selain elemen kepemimpinan yang berperan serta dalam perwujudan Republik Indonesia, ada pula keterlibatan santri yang menjadi garda terdepan dalam pengenyahan penjajah dari bumi pertiwi. Di bawah komando KH Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945 hingga mencapai puncak perlawanannya pada 10 November 1945.

Ketika Presiden Jokowi merekognisi keberadaan santri sebagai salah satu elemen penting dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, menunjukkan adanya keberpihakan Jokowi terhadap Umat Islam. Hal ini menjadi *counter* narasi terhadap berbagai pihak yang selama ini menganggap Jokowi sebagai penguasa yang anti-Islam.

Peran Humanisasi

Peringatan HSN 2022 mengambil tema sangat sublimatik perihal optimalisasi peran santri dalam menjaga martabat kemanusiaan. Secara sosiologis, tema ini menyiratkan sebuah pesan dan serual moral agar santri selalu menjaga marwahnya sebagai pribadi yang bersedia mendarmabaktikan hidup untuk bangsa dan negara. Sebab, sedari dulu keberadaan santri yang ditempa dari lingkungan pesantren dan dicetak untuk menjadi *munzirul qaum* mempunyai tugas pencerahan dan memberi teladan bagi masyarakat.

Salah satu bentuk tanggung jawab sosial yang perlu dilakukan santri

adalah bagaimana memosisikan diri sebagai pijar keadaban yang dapat memotivasi dirinya dan orang lain kepada ekosistem kebaikan dan kemaslahatan (*amar mairuf*). Dengan kata lain, melalui konsep amar mairuf, santri bisa mengambil peran humanisasi dalam mengajak dan mengadvokasi berbagai pihak agar menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri dan sesamanya.



KR-JOKO SANTOSO

Di samping itu, tugas lain yang tak kalah penting dilakukan oleh santri adalah bagaimana memosisikan diri sebagai kontrol sosial agar bisa mengendalikan kemudaratan dan kemunggaran di lingkungannya (*nahi munkar*). Melalui konsep ini, santri perlu melakukan liberasi atau pembebasan manusia dari berbagai sistem pengetahuan, sosial, ekonomi, dan politik yang bisa menjerumuskan dirinya ke dalam kubang kejahatan dan kemaksiatan. Sebab, diakui atau tidak, banyak di antara kita yang terbelenggu oleh sistem oligarkhis. Yang membuat banyak orang lupa diri dan menghalalkan segala cara untuk memperoleh pundi-pundi material dan kepentingan personal.

Transendensi

Ketika santri bisa menyadari pentingnya mendarmabaktikan dalam peran-peran humanisasi dan liberasi dalam membantu masyarakat agar tak terjebak dalam kerangkeng besi kemudaratan dan kemaksiatan, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan santri adalah transendensi. Melalui tindakan transendensi ini, santri perlu mengarahkan dan mengingatkan pihak lain agar menjalani kehidupan dengan bermakna.

Kehidupan bermakna yang dimaksud sangat terkait dengan bagaimana menjalankan nilai-nilai kemanusiaan yang bermuara kepada nilai-nilai ketuhanan. Sebab, disadari atau tidak, dalam lintasan kehidupan, ada sebuah titik dimana manusia diciptakan untuk menjalin hubungan antriformis antarsesama sekaligus menjalin hubungan theomorfis dengan Tuhan. Keduanya berkelindan dalam satu nafas agar setiap orang bisa memahami bahwa dirinya adalah wakil Tuhan yang bertanggung jawab bagi kelestarian dan kedamaian kehidupan.

Dengan demikian, posisi *munzirul qaum* yang dilakukan santri dengan skema darmabakti humanisasi, liberasi, dan transendensi meminjam cara berpikir Kuntowijoyo sebagai menjadikan keberadaan santri sebagai salah satu soko guru peradaban Indonesia yang berdaya dalam menjaga martabat kemanusiaan. **□-d**

***) Fathorrahman Ghuftron, Wakil Katib Syuriah PWNUI Yogyakarta**

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opini-kr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

TAJUK RENCANA

Gagal Ginjal Akut

KASUS gagal ginjal akut yang menimpa anak-anak beberapa hari terakhir ini benar-benar harus mendapat perhatian berbagai pihak terkait. Kasus tersebut tidak hanya menimbulkan keprihatinan dan kekhawatiran masyarakat, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi anak-anak.

Seperti sudah diungkapkan, RSUD Dr Sardjito telah menangani 13 kasus gagal ginjal akut pada anak yang mengalami peningkatan sejak September 2022. Tim dokter menganjurkan orang tua agar lebih cermat dan waspada serta mendekeksi dini gejala yang muncul pada anak di bawah usia enam tahun.

Data pasien gagal ginjal akut progresif atipikal (tidak khas) selama Januari 2022 sampai dengan Oktober 2022, tercatat ada 13 kasus yang ditangani oleh RSUD Dr Sardjito. Dari 13 kasus tersebut, 6 anak meninggal dunia, 3 anak dinyatakan sembuh, 4 anak masih menjalani rawat inap. Mereka berasal dari DIY (6 anak) dan luar DIY (7 anak). Khusus 6 kasus yang berasal dari wilayah DIY, 2 anak memiliki riwayat berkaitan dengan Covid-19 dan 4 anak belum diketahui sebabnya.

Terkait kasus tersebut, Dinkes DIY terus melakukan pelacakan lebih lanjut terhadap munculnya gagal ginjal akut ini, sedangkan RSUD Dr Sardjito terus berkonsentrasi dengan memanfaatkan seluruh sumber daya untuk mengungkap penyebab utama kasus tersebut.

Kepada orangtua, disarankan supaya meningkatkan kehati-hatian dan kewaspadaan, terutama orangtua yang memiliki anak di bawah usia 6 tahun. Para orangtua juga diimbau agar tidak memberikan konsumsi obat-obatan

yang didapatkan secara bebas tanpa anjuran tenaga kesehatan yang berkompeten.

Menurut Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, temuan kasus 13 anak gagal ginjal akut di DIY menjadi fokus perhatian Pemda DIY. Namun karena pemicu munculnya kasus belum diketahui secara detail, Pemda DIY masih harus menunggu hasil penelitian yang dilakukan Pemerintah Pusat.

Sesuai arahan dari pusat, obat cair yang sifatnya sirup sementara ini tidak diperbolehkan. Karena itu, Gubernur DIY juga minta masyarakat menaatinya. Menunggu ketentuan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat.

Benarkah penyebab gagal ginjal akut yang menasar anak-anak akhir-akhir ini adalah obat-obat cair berupa sirup? Itu masih akan diteliti. Semua belum bisa dipastikan. Kementerian Kesehatan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah berkoordinasi untuk menentukan produk obat sirup yang mengandung bahan kimia perusak ginjal, dan segera ditarik dari pasaran.

Menteri Kesehatan menyebutkan, rencana penarikan produk obat sirup itu berkaitan dengan temuan tiga zat kimia berbahaya, yakni ethylene glycol (EG), diethylene glycol (DEG), dan ethylene glycol butyl ether (EGBE), pada 15 sampel produk obat sirup yang diteliti dari pasien gangguan ginjal akut.

Tentunya masyarakat sangat memerlukan kejelasan pemerintahan, terkait gagal ginjal akut tersebut. Akankah keresahan kalangan orangtua harus menunggu sampai muncul obat baru penangkal gagal ginjal akut? **□-d**

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
@ pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Program Pelatihan UMKM Online bagi Perempuan

MASA pandemi, kaum perempuan paling merasakan dampak karena berimbas pada pendapatan keluarga. Bahkan dalam data, ditunjukkan misalnya semester 2022 naik 2 kali lipat dibandingkan 2021, jumlah perempuan penjual produksi UMKM di Tokopedia.

Belum lama ini, saya mengikuti program 'Kelas Perempuan Maju Digital Yogyakarta: Peran, Tantangan Serta Peluang Bagi Pertumbuhan Ekonomi Nasional' dan 'Kelas Maju Digital Pemula', yang diadakan Tokopedia, belum lama ini di Yogyakarta. Acara yang menghadirkan beragam program melalui inisiatif hyperlocal demi memudahkan bisa menjual melau

lui teknologi internet. Dengan teknologi *geo-tagging* yang bertujuan untuk mendekatkan penjual dengan pembeli setempat agar UMKM punya kesempatan yang sama bertumbuh.

Alangkah baiknya, jika program yang mengajari menjual produk melalui toko online semacam itu sering diadakan. Khususnya bagi perempuan, karena banyak yang masih gagap teknologi. Program semacam ini akan mendorong kaum perempuan, untuk menambah penghasilan. Misalnya bisa mengurus NIB dengan mudah dengan online. Saya berharap program semacam ini akan ada lagi. **□-d**

***) Ir Emmi Mardiyani, Semaki Gede Yogyakarta**

Hati-hati Hoaks Berita Kesehatan

SEJAK disebutnya obat sirup perusak ginjal, maka di medsos berserakan pelbagai catatan obat-obatan sirup serta gambarnya. Sekadar mengingatkan, hati-hati saja menghadapi hal itu, juga jangan spontan langsung sebar. Meski dalam selebaran yang diposting berkop BPOM dan lain sebagainya, jangan mudah percaya. Apalagi hoaks berita kesehatan termasuk cukup tinggi. Bahkan ada

pernyataan, semua obat sirup termasuk herbalnya dilarang dan ditarik dari peredaran.

Benarkah? Untuk itu, bila kita pengguna obat dan menjadi khawatir dengan obat yang dulu mungkin diresepkan dokter, lebih baik bila konsultasi ke dokter kembali. Dan apapun keputusannya, akan membuat kita lebih tenang. Insya Allah. **□-d**

Yanto, Pugeran Maguwoharjo Sleman

Apakah Polisi Tidak Boleh Kaya?

Sarworo Soeprpto

APAKAH polisi, juga anggota ABRI dan ASN, tidak boleh kaya? Juga apakah polisi, anggota ABRI dan ASN tidak boleh pamer kekayaan, seperti halnya anggota legislatif? Tidak ada regulasi atau aturan yang melarangnya. Semua polisi, anggota ABRI dan ASN, seperti halnya warganegara lain, boleh kaya, dan juga boleh-boleh saja memamerkan kekayaannya. Hanya risiko ditanggung sendiri.

Di negara demokrasi, apapun nama demokrasinya (Pancasila, liberal, ter-pimpin, anu, ini itu), tidak ada larangan untuk kaya bagi warganegara. Semua orang boleh kaya. Yang penting kekayaan itu diperoleh secara halal dan tidak melanggar hukum. Bahkan setiap orang dianjurkan dan didorong untuk kaya, walaupun semua agama dan etikamoralitas Nusantara mengajarkan agar manusia hidup secukupnya, sepatutnya dan tidak berlebihan (Jawa: *sakmadya*).

Juga tidak ada larangan untuk pamer kekayaan. Ini urusan pribadi. Tergantung pribadi masing-masing. Kalau memang ingin pamer, tidak ada yang melarang. Tidak ada regulasi yang mengat

Isu Lama

Isu sosial seperti di atas itulah yang hari-hari ini menjadi perbincangan publik. Khususnya sesudah muncul kasus Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa, beserta aneka cerita di belakangnya. Kisah kedua petinggi kepolisian tersebut dianggap mewakili arus utama gaya hidup hedonis di lingkungan pejabat publik.

Perihal aparatur negara yang berusaha kaya melalui profesinya, dan juga gaya hidup hedonis di kalangan pejabat publik, sesungguhnya bukan isu baru. Pada era orde baru, tepatnya sekitar 1978, Presiden Soeharto sampai menacangkan pola hidup sederhana untuk

penyelenggara negara. Bahkan untuk menyukseskan anjuran itu, sampai-sampai pesan moral untuk mencegah gaya hidup mewah tadi dimasukkan sebagai materi penataran P4 (Pedoman Penghayaan dan Pengamalan Pancasila). Pada butir ke-33 nilai-nilai Pancasila, yang keseluruhannya berjumlah 36, disebutkan agar manusia Indonesia tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.

Di era reformasi, khususnya di era periode I kepemimpinan Jokowi, Kementerian PAN-RB juga mengeluarkan surat edaran (SE) untuk mendorong hidup sederhana bagi penyelenggara negara. SE No 13 Th 2014 tersebut bertajuk Gerakan Hidup Sederhana. Dalam SE itu disebutkan agar ASN dan para pejabat publik tidak memperlihatkan kemewahan dan/atau sikap hidup berlebihan, serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan kepatantasan sebagai rasa empati kepada masyarakat.

Macan Ompong

Publik sesungguhnya tahu bahwa anjuran dan himbauan untuk hidup *sakmadya* n' apalagi sederhana n' bagi penyelenggara negara, ibarat macan ompong. Anjing menggonggong kafilah berlalu, demikian peribahasannya. Boleh saja petinggi negeri menganjurkan ini itu yang baik-baik, tetapi anjuran tadi ibarat masuk kuping kanan keluar kuping kiri.

Agaknya ada sesuatu yang salah dengan genetik manusia Indonesia yang kebanyakan suka berburu kekayaan melalui cara-cara tidak halal dan melanggar hukum, serta pamer kekayaan kepada publik. Kesukaan di-wahhh pada masyarakat kita, bukan monopoli kelompok elite saja, melainkan juga dimiliki orang kebanyakan, termasuk dari golongan strata sosial paling rendah sekalipun. Bahkan kaum intelektual dan seniman pun juga dihinggapi sindrom serupa: haus popularitas dan suka di-wahhh. Masyarakat kita umumnya begitu mengagungkan orang yang kaya dan sukses secara materi. Dari mana asal kekayaan itu, dan bagaimana cara mendapatkan, tidak pernah dicoba untuk dikritisi.

Apakah keteladanan nyata yang ditunjukkan elite masyarakat mampu mengatasi penyakit sosial-kultural ini? Nampaknya tidak sederhana itu. Masyarakat kita sudah terlanjur dihinggapi penyakit sosial-kultural yang bernama sindrom kemiskinan. **□-d**

***) Sarworo Soeprpto, peminat masalah sosial dan kebudayaan.**

Pojok KR

Kementerian Kesehatan dan BPOM segera menarik obat sirup perusak ginjal.
-- Cukup ditarik?

Kolaborasi Indonesia-Australia, Pemda DIY hidupkan iklim musik orkestra.
-- Tambah istimewa.

Dialog merupakan metode terbaik untuk mewujudkan keamanan di DIY.
-- Juga gerak cepat.

Berabe

Kedaulatan Rakyat

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktor Utama:** M Wirnon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurija Nugroho Samawi SE MM MSC. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggung jawab percetakan
Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan: H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifulah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang: Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil: Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujyanto SPd, Wakil: Driyanto.
Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan: Sri Warsiati.
Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd, Wakil: Asrul Sani.
Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragi Dedy TP

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486. **Penerbit:** PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945. **Perintis:** H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Pemimpin Umum: M Wirnon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussabada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afriati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Lattief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Setretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyanto.
Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrky23@yahoo.com, iklankrky13@gmail.com.
Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'. Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris). Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi DI s/d SI, Permikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%
Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)